

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2024



MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA BANDA ACEH



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik - Gedung Pasar Atjeh Baru Lt. 3
Jalan Diponegoro - Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kota Banda Aceh, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja DPMPTSP Kota Banda Aceh. Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah perlu Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko. Secara umum, RTP meliputi :

1. Pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi.
2. Penguatan lingkungan pengendalian.
3. Pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko.
5. Pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.
6. Pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur organisasi dan praktik bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian intern juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 24 Juli 2024
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



Bujang Sahputra, S.Kom

Pembina /IV/a

Nip.19750810 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG.....1

 B. DASAR HUKUM 1

 C. TUJUAN2

 D. MANFAAT2

 E. RUANG LINGKUP3

BAB II4

PROGRAM, KEGIATAN DAN TUJUAN PROGRAM4

BAB III.....6

PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA.....6

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 6

SATU PINTU KOTA BANDA ACEH.....6

 A. IDENTIFIKASI RISIKO.....6

 - Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :.....6

 - Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :.....6

 Masih kurangnya pengawasan antar dinas teknis terkait terhadap pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya.....

 B. ANALISIS RESIKO 7

 C. PETA RISIKO9

BAB IV 11

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 11

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Walikota tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pemimpin instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana tindak pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun instruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.

Oleh karena itulah, implementasi SPIP di lingkungan instansi pemerintah menjadi hal yang strategis dan wajib untuk diimplementasikan oleh semua jajaran pada DPMPTSP Kota Banda Aceh.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

C. TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai dilingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh.

D. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh sehingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok DPMPTSP Kota Banda Aceh.

2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
3. Penyelenggaraan SPIP sebagai dasar pemantauan kemajuan penyelenggaraan SPIP yang berkelanjutan.
4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari Visi dan Misi DPMPTSP Kota Banda Aceh dapat diwujudkan secara efisien dan efektif.
5. Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.
6. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

E. RUANG LINGKUP

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di DPMPTSP pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian atas kegiatan-kegiatan strategis melibatkan seluruh jajaran unit kerja di lingkungan DPMPTSP.
2. Pengendalian Intern atas pelaksanaan program dan kegiatan atas rencana tindak pengendalian dalam tahun 2024.

BAB II
PROGRAM, KEGIATAN DAN TUJUAN PROGRAM

Pada tahun anggaran 2024 mempunyai 6 program, 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan seperti tercantum, pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Tujuan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
	3	Penyediaan Administrsi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium penanggung jawab keuangan
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian seragam dinas Pegawai
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan administrasi umum perangkat daerah terpenuhi
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang terpenuhi
	12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tepenuhinya unit kerja internal yang mendapat layanan service dan suku cadang kendaraan
	14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya peralatan kerja yang mendapat layanan service dan suku cadang
	15	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor yang mendapatkan layanan service

II		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
8			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	16		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	
9			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
	17		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembuatan peta potensi peluang usaha untuk investasi
III		Program Promosi Penanaman Modal		
10			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	18		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
IV		Program Pelayanan Penanaman Modal		
11			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	19		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	20		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Terintegrasi secara Elektronik
V		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
12			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	21		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Terpenuhinya peningkatan realisasi nilai investasi dan ditingkatkannya kepatuhan pelaku usaha dalam ketentuan penanaman modal
	22		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
	23		Pengawasan Penanaman Modal	
VI		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
13			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	24		Pengelolaan, Peyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan

BAB III

PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

A. IDENTIFIKASI RISIKO

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 yang disusun DPMPTSP Kota Banda Aceh diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada DPMPTSP.
2. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial pada DPMPTSP.

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani yaitu:

a. Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :

Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi.

b. Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :

Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan penanaman modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.

Selain risiko dalam pencapaian tujuan strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh, terdapat risiko lainnya yang menghambat pencapaian tujuan kegiatan utama organisasi yaitu:

1. Berkurangnya jumlah investor yang berinvestasi, sehingga rendahnya capaian nilai investasi di Banda Aceh

2. Masih minimnya kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan
3. Data pelaku usaha belum valid
4. Adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin
5. Laporan jumlah pelaku usaha belum mencapai target
6. Rendahnya kualitas layanan yang diterima Masyarakat
7. Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi
8. Masih kurangnya pengawasan antar dinas teknis terkait terhadap pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya.

Adapun Daftar Risiko Teridentifikasi diuraikan dalam Lampiran 1.

B. ANALISIS RISIKO

Sesuai definisinya bahwa analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya, adapun analisis risiko terhadap program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 Analisis Risiko terhadap Pencapaian Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Contoh
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

: Kota Banda Aceh
: 2024
: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial

Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi b	Kode Risiko c	Analisis Risiko		Skala Risiko f=dxe
			Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan *) e	
I Risiko Strategis					
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSP.24.18.21.01	3	4	12
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSP.24.18.21.02	2	3	6
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.					
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSO.24.18.21.01	2	3	6
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSO.24.18.21.02	3	4	12
III Risiko Operasional OPD 1: ...					
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	ROO.24.18.21.01	3	4	12
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	ROO.24.18.21.02	3	4	12

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran kode risiko
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan munculnya pernyataan risiko secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Faktor manusia : komitmen dan kompetensi petugas, kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap perizinan berusaha, pemahaman pelaku usaha dan motivasi petugas
 - b. Faktor anggaran : keterbatasan anggaran
 - c. Faktor metode : perencanaan yang kurang, kebijakan pemerintah, Koordinator lintas sektor, sosialisasi dan monitoring evaluasi kegiatan yang masih kurang
 - d. Faktor mesin/peralatan : kondisi dan keterbatasan peralatan kerja
 - e. Faktor bahan baku/material : format laporan dan data yang kurang representatif, serta spesifikasi sarana dan prasarana.
2. Pernyataan risiko yang telah teridentifikasi, jika faktor penyebabnya tidak dikendalikan akan menimbulkan dampak yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan/program. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dari pemilik risiko.

C. PETA RISIKO

Gambar 4.2. Peta Risiko Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024.

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kurang signifikan	signifikan	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Sering	4				
	Sering	3				
	Jarang	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan			Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi

Berdasarkan peta risiko diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Terdapat 2 risiko yang mempunyai level sangat tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut sering/sangat sering dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi, yaitu risiko :
 - a. Belum Optimalnya Website MPP dan belum terintegrasinya aplikasi dengan website MPP
 - b. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal dikarenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim, rendahnya kepatuhan investor/pelaku usaha dalam pelaporan LKPM sehingga dampak dari hal tersebut munculnya usaha yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.
2. Dampak ini muncul karena pengelola kegiatan belum konsekuen dan kemungkinannya sering terjadi serta signifikan terhadap pencapaian tujuan pada Sekretariat.

BAB IV

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Berdasarkan hasil Analisis Risiko terhadap kegiatan yang teridentifikasi maka Rencana Tindak Pengendalian dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk semua program/kegiatan DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2024 telah mempunyai pengendalian terpasang yang diharapkan efektif dalam pengendalian dampak terhadap risiko yang telah teridentifikasi sehingga tidak menghambat dalam pencapaian tujuan program/kegiatan
2. Penetapan pengendalian terpasang dilakukan oleh pemilik risiko berdasarkan penyebab dari munculnya pernyataan risiko yang telah teridentifikasi agar dapat meminimalisir/menghilangkan dampak pada pencapaian tujuan
3. Penetapan pengendalian terpasang juga berdasarkan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, metode yang digunakan serta sarana dan prasarana yang mendukung, Selain itu komitmen, kerjasama dan koordinasi lintas sektor juga sangat penting.
4. Pengendalian terpasang yang telah ditetapkan akan digunakan dalam penyusunan rencana tindak pengendalian, rencana informasi dan komunikasi pengendalian serta rencana pemantauan berkelanjutan atas pengendalian agar tujuan dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NAMA PEMDA (pemrov/pemkot/pemkab)

Tahun Penilaian : 2024

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (<i>cascading</i>)	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai

E PENEDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	2	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

Contoh
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah ...

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Banda Aceh					
Tahun Penilaian		: 2024					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai	Kekosongan jabatan Fungsional	Memadai	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan belum ditentukan	Memadai	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan belum ditentukan
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	Sudah ada SK pendelegasian wewenang	Kurang memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab belum dilaksanakan secara tepat	Kurang memadai	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang memadai	Kurangnya pelatihan terhadap SDM yang sesuai kompetensi	Memadai		Memadai	
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai		Memadai		Memadai	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

LAMPIRAN 2

Form 2a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: RPD 2024-2026
Sumber Data	: RPD 2023-2026
Visi	: -
Misi Strategis RPD	: -
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPD	1 Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
	2 Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
	3 Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	4 Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan
	5 Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan
	6 Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial
	7 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata
	8 Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya
	9 Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
	10 Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
	12 Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
	13 Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	3 Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	6 Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial
Sasaran RPD	3.1 Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	6.1 Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	3.1 Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	6.1 Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
IKU Sasaran RPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Pertumbuhan Ekonomi

Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Pengelolaan Data dan Sistem InformasiPenanamanModal	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Program Promosi Penanaman Modal	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
Urusan Pemerintahan Daerah	: Urusan Wajib Penanaman Modal	
Nama Dinas Terkait	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	TUJUAN	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
		Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial
	SASARAN	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
		Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
	IKU	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Program	Program Pengelolaan Data dan Sistem InformasiPenanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah....

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Kota Banda Aceh : 2024	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Tindak Lanjut
a	b	c	d
1			
2	LHR Nomor : 700/R.047/ITKOT-LHR/ 2023 Tanggal 08 November 2023	- Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non berusaha pada DPMPTSP Kota Banda Aceh telah dilaksanakan	Telah ditindak lanjuti dengan Penyelesaian Perwal yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
3			
4			

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DINAS XXX KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	:	2024
Periode yang dinilai	:	2024-2026
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Penanaman Modal
OPD yang Dinilai	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sumber Data	:	Renja/Restra
Tujuan Strategis	:	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
	:	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial
Program dan Kegiatan Utama	Program :	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Kegiatan:	Kegiatan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
	Kegiatan:	Kegiatan pembuatan peta potensi Investasi Kabupaten/Kota.
	Program :	2. Program Promosi Penanaman Modal
	Kegiatan:	Kegiatan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
	Program :	3. Program Pelayanan Penanaman Modal
	Kegiatan:	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program :	4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kegiatan:	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
	Program :	5. Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.
	Kegiatan:	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	Sub Kegiatan :		Outcome :		Target :	
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan		Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen
		Penyusunan rencana umum Penanaman Modal daerah kabupaten/kota.	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen
		Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah kabupaten/kota.	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			Dokumen
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Pelaku Usaha
		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Pelaku Usaha
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Kegiatan Usaha
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.			Pelaku Usaha
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan : serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			Kegiatan Usaha
		Pengelolaan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.			Dokumen

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemda

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Penilaian : 2024

Periode yang dinilai : 2024-2026

Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial

Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Tujuan Strategis Pemko : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Sasaran Strategis Pemko : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSP.24.18.21.01	Kepala DPM/PTS P	Belum Optimalnya Website MPP dan belum terintegrasinya aplikasi dengan website MPP	Internal dan Eksternal	C	Kurangnya interaksi dan partisipasi publik, tidak efisiennya pelayanan publik	Pemerintah Kota Banda Aceh, DPM/PTS, dan masyarakat
2.	Tujuan Strategis Pemko : Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial Sasaran Strategis Pemko : Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSP.24.18.21.02	Kepala DPM/PTS P	Rendahnya Kepatuhan Investor/Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM di Kota Banda Aceh	Internal dan Eksternal	C	Munculnya usaha yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Banda Aceh

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh											
Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Tahun Penilaian : 2024											
Periode yang dinilai : 2024-2026											
Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal											
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1.	Tujuan Strategis OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSO 24.18.21.01	Kepala DPMP/TSP	Belum Optimalnya Website MPP dan belum terintegrasinya aplikasi dengan website MPP	Eksternal	C	Kurangnya interaksi dan partisipasi publik, tidak efisiennya pelayanan publik	Pemerintah Kota Banda Aceh, DPMP/TSP, dan masyarakat	
	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.										
	Sasaran Strategis OPD										
Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan.											Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Banda Aceh
2.	Tujuan Strategis OPD	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PNDM/PMA	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSO 24.18.21.02	Kepala DPMP/TSP	Rendahnya Kepatuhan Investor/Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM di Kota Banda Aceh	Internal dan Eksternal	C	Munculnya usaha yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat		
	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial										
Sasaran Strategis OPD											Pemerintah Kota Banda Aceh
Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial											

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2024-2026
Tujuan Strategis OPD	: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman Pertumbuhan ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.
Sasaran strategis OPD	: Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan pada Penanaman Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penanaman Modal.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Keluaran	Risiko		Kode Risiko	Pemilik	Sebab ^(*)		C/UC	Dampak ^(*)	
			Tahap	Uraian			Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Program											
1	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat.									
	- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman dan Non Penanaman yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan									
	Pengolahan, Penyajian dan Penyaluran Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.	Pelaksanaan.	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyelenggarakan layanan online, dan kurangnya transparansi	ROO.24.18.21.01	Kepala DPMP/TSP	Belum Optimalnya Website MPP dan belum terintegrasinya aplikasi dengan website MPP	Eksternal / Internal	C	Kurangnya interaksi dan partisipasi publik, tidak efisiennya pelayanan publik	Pemerintah Kota Banda Aceh, DPMP/TSP, dan masyarakat
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal.									
	- Kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.	Persentase laporan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.									
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang telah Dimasuki dan Diversifikasi Data, Profit dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan : serta dilakukan Evaluasi Penilaian Ketaatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pelaksanaan.	Belum Optimalnya pelaksanaan pengawasan penanaman modal dikarenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sehingga pelaksanaan pengawasan sangat minim	ROO.24.18.21.02	Kepala DPMP/TSP	Bendahara kepatuhan investor/ pelaku usaha dalam pelaporan LKPM	Eksternal / Internal	C	Munculnya usaha yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Banda Aceh

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Kota Banda Aceh					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penanaman Modal					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko f=dxe	
a	b	c	d	e		
I Risiko Strategis						
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSP.24.18.21.01	3	4	12	
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSP.24.18.21.02	2	3	6	
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.						
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSO.24.18.2101	2	3	6	
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSO.24.18.2102	3	4	12	
III Risiko Operasional OPD 1: ...						
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	ROO.24.18.21.01	3	4	12	
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	ROO.24.18.21.02	3	4	12	

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran kode risiko
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh						
Tahun Penilaian : 2024						
Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.						
: Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial						
: Urusan Penanaman Modal.						
Urusan Pemerintahan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Pengawasan Penanaman Modal di Kota Banda Aceh belum optimal	RSP.24.18.21.01	12	Kepala DPMPTSP	Rendahnya Kepatuhan Investor/Pelaku Usaha dalam pelaporan LKPM	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tidak meningkat
II Risiko Strategis OPD ...						
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSO.24.18.21.01	12	Kepala DPMPTSP/ Kabid Penanaman Modal	Rendahnya Kepatuhan Investor/Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM di Kota Banda Aceh	Munculnya usaha yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat
2	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSO.24.18.21.02	6	Kepala DPMPTSP/ Kabid Pelayanan Perizinan	Belum Optimalnya Website MPP dan belum terintegrasinya aplikasi dengan website MPP	Kurangnya interaksi dan partisipasi publik, tidak efisiennya pelayanan publik
III Risiko Operasional OPD ...						

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab
- Kolom g diisi dengan dampak

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial

Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal.

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Pengawasan Penanaman Modal di Kota Banda Aceh belum optimal	RSP.24.18.21.01	Facilitasi Penanaman Modal bagi pelaku usaha	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	1. Peningkatan promosi investasi 2. Optimalisasi lahan yang tersedia	Kepala Daerah/ Kepala DPMP/TSP	TW IV 2024
II Risiko Strategis Dinas...							
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSO.24.18.21.01	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal	Kepala Daerah/ Kepala DPMP/TSP	TW IV 2024
2	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSO.24.18.21.02	Koordinasi dengan pihak terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Adopsi Aplikasi dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Kepala Daerah/ Kepala DPMP/TSP	TW IV 2024
3							
III Risiko Operasional Dinas...							

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/ unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal.							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Peningkatan promosi investasi 2. Optimalisasi lahan yang tersedia	Publikasi Potensi dan Peluang Investasi (Buku, Brosur, Media Massa)	DPMP/TSP Kota Banda Aceh	Instansi Terkait, Investor, masyarakat	TW IV 2024	Desember 2024	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
2	Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal	Publikasi Potensi dan Peluang Investasi (Buku, Brosur, Media Massa)	DPMP/TSP Kota Banda Aceh	Instansi Terkait, Investor, masyarakat	TW IV 2025	Desember 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
3	Usulan anggaran untuk kegiatan promosi investasi	Publikasi Potensi dan Peluang Investasi (Buku, Brosur, Media Massa)	DPMP/TSP Kota Banda Aceh	Instansi Terkait, Investor, masyarakat	TW IV 2026	Desember 2026	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

CONTOH
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh						
Tahun Penilaian : 2024						
Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial						
Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal.						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Peningkatan promosi investasi 2. Optimalisasi lahan yang tersedia	Penyusunan Dokumen Strategi promosi Investasi	Kepala DPMPTSP/Kabid. Penanaman Modal	TW IV 2024	Desember 2024	Usulan Anggaran Penyusunan Dokumen Strategi promosi Investasi
2	Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penanaman Modal	Kepala DPMPTSP/Kabid. Penanaman Modal	TW IV 2025	Desember 2025	Monitoring dan Ivaluasi telah dilaksanakan
3	Usulan anggaran untuk kegiatan promosi investasi	Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala DPMPTSP/Kabid. Penanaman Modal	TW IV 2026	Desember 2026	Usulan Anggaran Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh										
Tahun Penilaian : 2024										
Tujuan Strategis :										
Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal.										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Pengawasan Penanaman Modal di Kota Banda Aceh belum optimal	RSP.24.18.21.01	Belum terjadi	1. Kurangnya promosi investasi. 2. Minimnya ketersediaan lahan berinvestasi di Kota Banda Aceh.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tidak meningkat	Tidak terjadi	1. Peningkatan promosi investasi 2. Optimalisasi lahan yang tersedia	TW IV 2024	Desember 2024	
	Masalah/ Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis Dinas ...									
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSO.24.18.21.01	Belum terjadi	Rendahnya Kepatuhan Investor/ Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM di Kota Banda Aceh	Munculnya usaha yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat	Tidak terjadi	Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal	TW IV 2024	Desember 2024	
2	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSO.24.18.21.02	Belum terjadi	Belum Optimalnya Website MPP dan belum terintegrasinya aplikasi dengan website MPP	Kurangnya interaksi dan partisipasi publik, tidak efisiennya pelayanan publik	Tidak terjadi	Adopsi Aplikasi dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali	TW IV 2024	Desember 2024	
III	Risiko Operasional Dinas ...									
	Masalah/ Risiko Baru:									

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di	Kode
RSP	19	1	1	1	RSP.19.01.01.01
RSO	19	2	5	1	RSO.19.02.05.01
ROO	19	3	25	1	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

- RSP Strategis Pemda
- RSO Strategis OPD
- ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

- 1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 PU dan Tata Ruang

4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

6 Sosial

7 Tenaga Kerja

8 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

9 Pangan

10 Pertanahan

11 Lingkungan Hidup

12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

13 Pemberdayaan masyarakat dan desa

14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

15 Perhubungan

16 Komunikasi dan informatika

17 KUKM

18 Penanaman Modal

19 Kepemudaan dan olah raga

20 Statistik
- 21 Persandian

22 Kebudayaan

23 Perpustakaan

24 Kearsipan

25 Kelautan dan perikanan

26 Pariwisata

27 Pertanian

28 Kehutanan/Perkebunan

29 Energi dan sumber daya mineral

30 Perdagangan

31 Perindustrian

32 Transmigrasi

33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif

34 Administrasi Kesekretariatan DPRD

35 Pembinaan dan Pengawasan

36 Perencanaan pembangunan, litbang

37 Keuangan dan Pendapatan

38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM

39 Bencana

40 Politik

99 Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

- 1 Pemda

2 Sekretariat Daerah

3 Sekretariat DPRD

4 Inspektorat Daerah

5 Dinas Pendidikan

6 Dinas Kesehatan

7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

9 Satuan Polisi Pamong Praja

10 Dinas Sosial

11 Dinas Ketenagakerjaan

12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13 Dinas Ketahanan Pangan

14 Dinas Lingkungan Hidup

15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 18 Dinas Perhubungan

19 Dinas Komunikasi dan Informatika

20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah

21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

22 Dinas Pariwisata

23 Dinas Pemuda dan Olah Raga

24 Dinas Perindustrian

25 Dinas Perpustakaan dan kearsipan

26 Dinas Pertanian

27 Dinas Perikanan

28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

29 Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah

30 Badan Kepegawaian Daerah

31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

33 RSUD

99 Lainnya

Risk Register Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Urusan Wajib/Pilihan : Pelayanan Dasar

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian : 2024
Periode yang dinilai : 2024-2026
Urusan Pemerintah : Urusan Penanaman Modal.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Sasaran Strategis Pemko Ke 3													
	DPMPTSP													
	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rendahnya kualitas layanan yang diterima masyarakat	RSP.24.18.21.01	Kepala DPMPTSP	Sering terjadinya gangguan jaringan pada sistem layanan.	Eksternal	C	Rendahnya kepuasan masyarakat atas penggunaan layanan.	Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPMPTSP	3	4	12	Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal													
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Rendahnya Kepatuhan Investor/Pelaku Usaha dalam pelaporan LKPM	RSO.24.18.21.01	Kepala DPMPTSP/ Kabid Penanaman Modal	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh	Eksternal	C	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tidak meningkat	Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPMPTSP	2	3	6	1. Peningkatan promosi investasi 2. Optimalisasi lahan yang tersedia
	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian Fasilitas / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.	Berkurangnya jumlah investor yang berinvestasi, sehingga Rendahnya capaian nilai investasi di Banda Aceh	ROO.24.18.21.01	Kepala DPMPTSP/ Kabid Penanaman Modal	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh	Eksternal /Internal	C	Rata - rata pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tidak meningkat	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Banda Aceh	3	4	12	Optimalisasi pelayanan yang tersedia

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH



Bulang Sahputra, S.Kom

PEMBINA/IV/a

Nip.19750810 200604 1 004